

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

2.1.2.1 Definisi *Good Governance*

Menurut *World Bank*, *good governance* diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis.

Menurut Kurhayadi et al., (2020:93) *Good governance* ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang secara solid dan juga bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi hingga pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif untuk menjalankan disiplin anggaran.

Menurut Gunawan (2021:41) *Good governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi yang semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut.

Menurut Hamirul & Alamsyahril (2020:2) *Good governance* merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Sementara menurut (Moenek & Dadang Suwanda, 2019) *Good governance* merupakan pengelolaan pemerintahan dengan mengikuti prinsip pengelolaan baik sehingga sumber daya yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya yaitu untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat diketahui bahwa *good governance* adalah suatu sistem yang terdapat pada suatu pemerintahan yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip pengelolaan yang baik dan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* sehingga pemerintahan sebagai suatu organisasi itu dapat memaksimalkan dan mencapai tujuan yang sebesar-besarnya yaitu kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

2.1.2.2 Ciri-Ciri *Good Governance*

Menurut Muin et al. (2017:14) terdapat beberapa ciri *Good governance* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Participation*; yaitu keterlibatan setiap komponen dalam suatu entitas atau institusi.

- 2) *Rule of Law*; yaitu memiliki kerangka kerja dan standar operasional yang jelas sehingga bisa menghindari kebiakan yang diskriminatif atau subyektif.
- 3) *Transparency*; yaitu setiap keputusan yang diambil berdasarkan kerangka kerja dan standar operasional yang dapat diketahui dan dapat diakses informasi prosesnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) *Responsiveness*; yaitu setiap institusi dalam proses pengambilan keputusannya harus memperhatikan dan mampu melayani seluruh *stakeholder* dalam Batasan-batasan yang rasional.
- 5) *Consensus Oriented*; yaitu setiap komponen dalam institusi diharuskan untuk menjalankan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama atau mufakat serta menghindari adanya kepentingan-kepentingan sepihak.
- 6) *Equity and Inclusiveness*; yaitu suatu keputusan mampu menjamin hak-hak setiap komponen dalam institusi sehingga mereka merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas dan tugas mereka.
- 7) *Effectiveness and Efficiency*; yaitu dukungan seluruh *stakeholder* suatu entitas bisnis atau institusi pelayanan publik diharapkan tercapai tujuan yang dicita-citakan atau ditargetkan dengan penggunaan sumberdaya (*resources*) secukupnya, sehingga suatu entitas dan institusi akan berpeluang beroperasi secara berkesinambungan (*sustainable*).
- 8) *Accountability*; yaitu setiap aktivitas yang berkaitan dengan dengan kepentingan publik memerlukan pertanggungjawaban kembali kepada publik.

2.1.2.3 Karakteristik *Good Governance*

Menurut Putra (2019:40) terdapat beberapa karakteristik *good governance* yaitu:

- 1) Masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris
- 2) Masyarakat yang terbuka
- 3) Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi
- 4) Eksekutif yang bertanggung jawab
- 5) Birokrasi yang professional sesuai dengan aturan hukum

2.1.2.4 Indikator *Good Governance*

Menurut Putra (2019:108) terdapat beberapa indikator *good governance* yaitu:

- 1) Dimensi *Tangible* (Berwujud)

Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan, kenyamanan tempat melakukan pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan, kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan, dan penggunaan alat bantu dalam pelayanan.

- 2) Dimensi *Reliability* (Keandalan)

Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan, memiliki standar pelayanan yang jelas, kemampuan petugas/aparatur menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan, dan keahlian petugas menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan

- 3) Dimensi *Responsiveness* (Ketanggapan)

Merupakan bagaimana sikap petugas dalam merespons setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, dan cermat atas keluhan pelanggan.

4) Dimensi *Assurance* (Jaminan)

Petugas memberikan jaminan ketepatan waktu, kepastian biaya, dan legalitas dalam pelayanan.

5) Dimensi *Empathy* (Empati)

Sikap petugas yang mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan dan dalam pelaksanaannya petugas/aparatur melayani dengan sikap ramah, sopan santun, tidak diskriminatif, dan menghargai setiap pelanggan.

Sedangkan menurut Sellang et al. (2019:92) indikator *good governance* yaitu:

1) Partisipasi Masyarakat

Merupakan hak suara yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2) Tegaknya Supremasi Hukum

Merupakan kerangka hukum yang bersifat adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu.

3) Transparansi

Merupakan seluruh proses pemerintahan yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan menyediakan informasi yang memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4) Peduli Pada *Stakeholder*

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan Berorientasi pada Konsensus

5) Kesenjangan

Merupakan hak bagi semua warga masyarakat untuk memiliki kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

6) Efektivitas dan Efisiensi

Merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin.

7) Akuntabilitas

Merupakan sikap pertanggungjawaban pemerintahan sektor publik dan organisasi-organisasi masyarakat kepada masyarakat dan Lembaga-lembaga yang berkepentingan

8) Visi Strategis

Merupakan sikap yang perlu dimiliki oleh para pemimpin dan masyarakat untuk menciptakan perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan indikator-indikator diatas penulis mengambil indikator partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

2.1.2.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Zamzami et al. (2018:71) Sistem pengendalian internal merupakan alat yang dirancang oleh manajemen untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan menjamin efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan catatan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Menurut Supriyono (2018:149) Sistem pengendalian internal merupakan rencana organisasi beserta dengan semua sistem yang terkoordinasi, baik keuangan dan sistem lainnya, yang disusun oleh manajemen perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan manajemen guna memastikan sejauh mana sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien untuk mengarahkan bisnis, termasuk terhadap kebijakan manajemen, pengamanan aset, pencegahan atau deteksi penipuan dan kesalahan, keakuratan dan kelengkapan dari persiapan ketepatan waktu informasi keuangan dan dapat diandalkan.

Sedangkan menurut Kurniawan (2020:23) Sistem pengendalian internal (*internal control system*) merupakan kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk menjaga aset perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Selanjutnya menurut Standar Profesional Akuntan Publik, Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang terdapat dalam suatu organisasi yang memiliki metode dan ketentuan yang terkoordinasi dan dianut untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, serta

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang dapat mendukung organisasi (Nusa, 2020).

Dari beberapa definisi diatas maka dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal merupakan alat yang berisi kebijakan, praktik, dan prosedur yang dirancang dan diterapkan oleh suatu organisasi untuk menjaga harta yang dimiliki oleh organisasi, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Kurniawan (2020:23) terdapat empat tujuan umum dari sistem pengendalian internal yaitu:

- 1) Menjaga aset organisasi.
- 2) Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.
- 3) Mendorong efisiensi dalam operasional organisasi.
- 4) Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur organisasi.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdapat beberapa unsur pengendalian internal yaitu:

- a) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang dapat menimbulkan perilaku positif serta mendukung terhadap pengendalian internal.

b) Penilaian Risiko

Pengendalian internal harus mampu untuk memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik internal maupun eksternal.

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian akan membantu organisasi untuk memastikan bahwa arahan dari pimpinan instansi pemerintahan untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi.

d) Informasi dan Komunikasi

Organisasi harus melakukan pencatatan atas informasi untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan. Selain itu informasi tersebut harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

e) Pemantauan Pengendalian Internal

Organisasi melakukan pemantauan untuk dapat menilai kualitas kinerja anggotanya dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revisi lainnya dapat ditindaklanjuti oleh organisasi terkait.

2.1.2.4 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Purnamawati (2018:158) indikator sistem pengendalian internal yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan suasana yang mempengaruhi lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas.

2) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen yang bertujuan untuk memastikan tujuan dapat tercapai dengan baik.

3) Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis serta mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan aktivitas operasi suatu organisasi.

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu sistem sepanjang waktu dan memastikan bahwa aktivitas pengendalian dapat berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur.

5) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan suatu proses dalam pengendalian yang berguna untuk menilai kejadian atau kondisi yang dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan juga pelaporan eksternal.

Berdasarkan indikator-indikator diatas penulis mengambil kegiatan pengendalian, penilaian risiko dan pengawasan.

2.1.3 Kinerja

2.1.3.1 Definisi Kinerja

Kinerja dapat didefinisikan sebagai apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh pegawai yang mempengaruhi seberapa banyak kontribusi yang dapat diberikan oleh pegawai tersebut kepada organisasi tempatnya bekerja.

Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan standar kriteria yang ditetapkan.

Menurut Sinaga et al. (2020:5) Kinerja ialah hasil kerja yang memiliki hubungan yang signifikan dengan pencapaian tujuan strategis organisasi, kepuasan dan kontribusi yang diberikan pada ekonomi.

Sementara menurut Suryani et al. (2020:2) Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan oleh setiap karyawan sebagai prestasi kerja yang dihasilkannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang ditampilkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi tempatnya bekerja. Kinerja juga merupakan bentuk pencapaian pegawai yang dapat dilihat melalui seberapa banyak kontribusi yang dapat diberikan sesuai dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan dan kontribusi yang diberikannya pada ekonomi organisasi tersebut.

2.1.3.2 Indikator Kinerja

Menurut Amiruddin (2019:48) terdapat beberapa indikator-indikator kinerja yaitu:

1) Efisiensi

Pertimbangan mengenai keberhasilan organisasi pelayanan public untuk mendapat laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis

2) Efektivitas

Untuk mengukur seberapa jauh tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan public tersebut dapat tercapai. Hal ini berkaitan dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

3) Keadilan

Merupakan kecukupan atau kepantasan terkait distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

4) Daya Tanggap

Merupakan seberapa peka organisasi pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan indikator-indikator diatas penulis mengambil indikator efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap.

2.1.3.3 Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana dan sebaik apa tugas-tugas yang telah dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi diperlukan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal tersebut ialah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawannya (Ismail, 2020)

Menurut Ismail (2020:2) pengukuran kinerja memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Untuk mengetahui kualitas personel karyawan yang berhubungan dengan sikap, watak maupun kekuatan dan kelemahan lainnya sehubungan dengan pekerjaan diperusahaan.
- 3) Untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh karyawan dalam menduduki jabatan lain (promosi) apakah melalui *training* terlebih dahulu atau tidak.

Selain itu menurut Ismail (2020:2) pengukuran kinerja memiliki dua manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Bagi Pekerja

Dapat digunakan sebagai umpan balik tentang prestasi dari hasil kerja karyawan selama ini yang akan memudahkan untuk mengetahui terkait kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada karyawan yang bersangkutan.

b) Bagi Perusahaan

Sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap karyawan yang berkaitan dengan promosi, jabatan, mutase, penentuan gaji dan kompetensi yang lebih efektif, demosi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk *training* yang akan dilakukan oleh organisasi terhadap karyawannya.

2.1.3.4 Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah proses untuk menilai kemajuan pekerjaan menuju pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya hingga menilai efektivitas tindakan untuk mencapai tujuan. Adanya pengukuran kinerja ini dapat memungkinkan satuan kerja pemerintah untuk memantau kinerja dalam menghasilkan keluaran, hasil, manfaat, dan dampak bagi satuan kerja pemerintah (Nurdin, 2021:279).

Menurut Syadullah (2019:62) penilaian kinerja organisasi sektor publik dapat dicapai melalui beberapa kategori pengukuran sebagai berikut:

- 1) Mengukur sumber daya ekonomi yang dapat ditentukan dengan membandingkan harga pembelian *input* dengan nilai yang ditentukan.
- 2) Mengukur biaya yang dalam pengukurannya menekankan pada nilai sumber daya yang dipakai dalam rangka untuk menyediakan produk atau jasa tertentu.
- 3) Mengukur efisiensi dengan memperhitungkan *output* yang diperoleh dalam kaitannya dengan sumber daya yang digunakan. Dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan maksimal pada tingkat penggunaan sumber daya yang minimum.

- 4) Mengukur efektivitas secara kuantitatif dihitung dengan tolak ukur rasio hasil aktual pada tingkat yang diharapkan.
- 5) Mengukur kualitas layanan yang dirancang untuk menilai sejauh mana kinerjanya dapat memuaskan masyarakat.
- 6) Mengukur kinerja keuangan.
- 7) Mengukur kinerja secara keseluruhan.

2.1.3.5 Pemerintahan Desa

Menurut Suprihatini (2018:19) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Suprihatini (2018:20) penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa (kepala desa beserta perangkat desa) dan Badan Permasyarakatan Desa. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun dibantu oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan desa.

2.1.3.6 Dana Desa

Menurut Oktara (2019:10) Dana Desa adalah dana APBN yang dianggarkan setiap tahunnya yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer

melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.

Selanjutnya menurut Oktara (2019:11) terdapat 4 tujuan Dana Desa yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- 2) Mengurangi tingkat kemiskinan.
- 3) Memajukan perekonomian desa.
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

2.1.3.7 Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa menurut Zulpikar et al. (2017:33) adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pelaksanaan serta proses *monitoring*, evaluasi dan pelaporan Dana Desa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan dana desa merupakan hasil kerja aparatur desa yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kegiatan pengelolaan Dana Desa meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pelaksanaan serta proses *monitoring*, evaluasi dan pelaporan Dana Desa yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan dan memperkuat masyarakat. Hal tersebut ditampilkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi tempatnya bekerja.

2.2 Kerangka Pemikiran

a) Pengaruh *good governance* terhadap kinerja pengelolaan dana desa

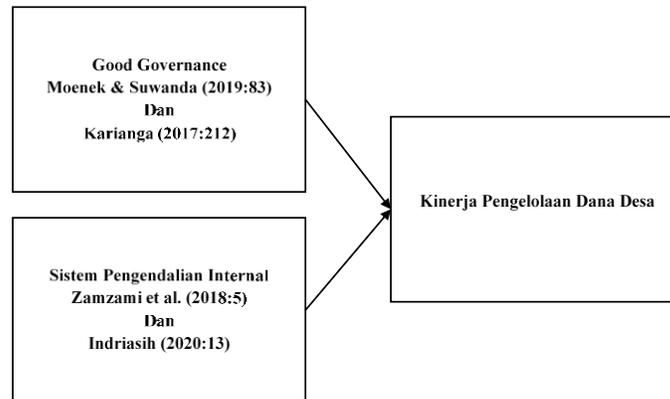
Menurut Moenek & Dadang Suwanda (2019:83) *Good Governance* merupakan sebuah upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dari pemerintah untuk memberikan kepada masyarakat yang ditampilkan dalam pencapaian kinerja pengelolaan sebagai komitmen yang telah ditetapkan dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Selain itu menurut Karianga (2017:212) *Good governance* merupakan hasil dari perbaikan kinerja pengelolaan yang terdiri dari 3 aspek yaitu niat baik dari pemerintah untuk mengelola anggaran, dukungan SDM, dan kemauan lembaga legislatif untuk melaksanakan fungsi *budgeting* dengan baik.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Karlina dan Sitti pada tahun 2021 menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan.

b) Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan dana desa

Menurut Zamzami et al. (2018:5) Sistem pengendalian internal merupakan alat yang dapat digunakan oleh suatu entitas unit kerja untuk menentukan kinerja pengelolaan terkait penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan entitas. Selain itu menurut Indriasih (2020:13) sistem pengendalian internal merupakan langkah yang secara sistematis juga obyektif memeriksa bukti yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan suatu entitas.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Tolley, Ridwan dan Kasim pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh positif dari penerapan *good governance* terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

H2: Terdapat pengaruh positif dari penerapan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan dana desa.